

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Memutus Rantai Kemiskinan: Studi di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

¹Hidayatur Rohmah, Luluk Dwi Kumalasari

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; rohmahhidayah2912@gmail.com

Received: March 06, 2023; In Revised: April 28, 2023; Accepted: May 20, 2023

Abstract

This study examines the effectiveness of the Direct Cash Assistance Program (BLT DD) in breaking the poverty chain in the village of Gading Bululawang, Malang. The BLT DD program is part of the government's efforts to break the poverty chain in Indonesia, especially in the Pandemic period. Every policy developed has positive and negative impacts in the implementation process. Based on the results of the field data collection, the community felt the BLT DD program helped meet their basic needs. The implementation of the program through several stages, namely determining names, cross checks, determination of names, and distribution of assistance. These steps are carried out transparently, with the participation of each hamlet head. Distribution of BLT DD assistance is done once a month. Over time, the distribution of assistance was hampered and the community did not understand the BLT DD program due to the lack of socialization of the village program. The method used in this study uses a qualitative approach with a type of case study. Research Subjects according to the criteria specified by researchers using purposive sampling techniques. Data collection in this study was carried out through observation, interview and documentation techniques. Based on the facts of field data and theoretical analysis by using the structural functionalism of Talcott Parson, the BLT DD program is considered to be quite useful to meet the basic needs of the community, but the community complained of a little delay given by the village. During the distribution process and lack of understanding of the support given so far. The results of the study resulted in the conclusion that the BLT DD program did not meet the effectiveness criteria because some indicators had not been met during the implementation process in the village of Gading Bululawang Malang.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Cash Direct Assistance Program (BLT DD), Poverty.

Pendahuluan

Peran pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan diawali dengan keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional yang mendesak sehingga memerlukan penanganan berbeda dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan RI maka terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya termasuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kompleks di seluruh negara baik negara maju maupun berkembang dan sudah menjadi persoalan yang lumrah sehingga seringkali mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak karena menjadi isu global maupun nasional. Fenomena kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang serba

kekurangan seperti rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan oleh kurangnya nilai produktivitas, keterampilan, rendahnya nilai tukar produksi dan keterbatasan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Sumber penghasilan penduduk yang rendah menyebabkan menurunnya produktivitas dan meningkatnya beban ketergantungan pada masyarakat (Arifin, 2020). Penyebab terjadinya kemiskinan sangatlah beragam salah satunya bencana dan wabah penyakit yang terjadi dua tahun silam yakni pandemi *Covid-19*. Hal diatas menjadi faktor utama pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan untuk meminimalisir meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi *Covid 19*. Implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program tersebut diharapkan dapat membantu mensejahterakan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat dalam hal ekonomi sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* lalu.

Program BLT DD menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia khususnya pada masa pandemi. Setiap kebijakan yang telah dibuat memberikan dampak negatif dan positif selama proses implementasinya. Dampak positifnya masyarakat kurang mampu memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pokok melalui bantuan sosial yang didapatkan selama pandemi dan pasca pandemi saat ini. Dampak negatifnya masyarakat bergantung dengan bantuan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, yang mana penelitian tersebut relevan dengan yang akan diteliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Dasri Sampulawa, dkk yang dimuat dalam jurnal of Education Technology Information Social Sciences and Health dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi masyarakat ekonomi lemah di Dusun Lirang, Bagaimana upaya penanggulangan Program BLT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan, keluarga penerima jejaring sosial yang terhenti karena pandemi covid-19 dan belum pernah menerima bantuan. Relevansi dengan penelitian ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program BLT. Sedangkan Perbedaan Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi Program BLT termasuk bentuk-bentuk, factor-faktor yang menyebabkan adanya implementasi Program. Sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana efektivitas Program BLT termasuk implementasi dan dampak selama ini kepada masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan di Desa Gading Bululawang Malang.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Ida dan Safrul Rijali yang dimuat dalam jurnal Mahasiswa Administrasi Public dan Administrasi Bisnis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan program BLT. Relevansi penelitian ini, sama-sama membahas tentang program yang telah disalurkan oleh pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan dan penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi dari program BLT, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang efektivitas dari program BLT tersebut kurang lebih dalam lima tahun terakhir ini

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Irma Yunita dan Andi Agustang yang dimuat dalam *Pinisi Journal of Sociology Education Review* dengan judul “Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana program bantuan langsung tunai di Desa Carawali tidak merata, dampak dari ketidakmerataan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu pada saat masa pandemi. Relevansi dengan penelitian ini, Sama-sama membahas tentang program bantuan langsung tunai dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang implementasi program dalam masyarakat. Sedangkan Perbedaan Penelitian ini lebih membahas tentang ketidakmerataan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang mana menjadi salah satu indikator dari penelitian yang akan saya teliti. Sedangkan penelitian saya membahas tentang efektivitas program yang telah dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat termasuk implementasi dan dampak adanya program dalam memutus rantai kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis, terperinci, mendalam, menyeluruh, dan sistematis tentang orang, peristiwa, latar sosial (social setting) atau kelompok dengan banyak metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk dipahami terkait hal beroperasi atau berfungsi dengan konteks secara efektif. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu anggota keluarga penerima bantuan BLT DD di desa Gading Bululawang Malang. Ciri utama dari teknik ini adalah anggota sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, purposive sampling adalah teknik pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data berakhir di beberapa titik, dengan menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting karena dengan pemeriksaan keabsahan data dapat dicapai kredibilitas data. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kredibilitas dengan menguji data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara, yang kemudian diuji kembali dengan dokumentasi atau observasi.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Pada awal tahun 2020 dunia dikagetkan dengan adanya bencana *virus covid-19* yang dikabarkan dari china melalui *World Health Organization (WHO)*. *Virus Covid-19* merupakan suatu pandemi yang menyebar antar manusia dengan sangat cepat dan menyebabkan munculnya permasalahan sosial salah satunya bidang ekonomi dari berbagai aspek tidak terkecuali perekonomian desa dan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Pada bulan September 2017 persentase kemiskinan tercatat sebesar 9-11% dan terus mengalami penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82% pada tahun 2018 dan 9,41% pada tahun 2019. Namun, semenjak virus *Covid-19* masuk di Indonesia pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,78% (Statistik, 2019). Wabah *Covid-19* ini diperkirakan

menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dari data bulan September 2019. Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir meningkatnya tinggi kemiskinan di Indonesia dengan mengeluarkan bantuan sosial baik berupa sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai), Kip (Kartu Indonesia Pintar), Subsidi listrik, PKH (Program Keluarga Harapan), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi yaitu BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa).

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menjadi salah satu bentuk upaya kepedulian pemerintah pada masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia termasuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dari pandemi *Covid-19*. Memutus rantai kemiskinan disini memiliki arti bahwasannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai standar yang ditentukan dan mencapai kesejahteraan. Indikator sejahtera setiap daerah berbeda-beda salah satunya terpenuhinya kebutuhan pokok dalam hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa mereka telah berada dalam kondisi sejahtera. Indikator kesejahteraan bisa berupa kesehatan, keadaan ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga dan lain-lain. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan hidup layak, sehat dan produktif. Terpenuhinya kebutuhan pokok menjadi konsep penting manusia dalam mempertahankan kesejahteraan hidup. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia melalui beberapa kebijakan diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

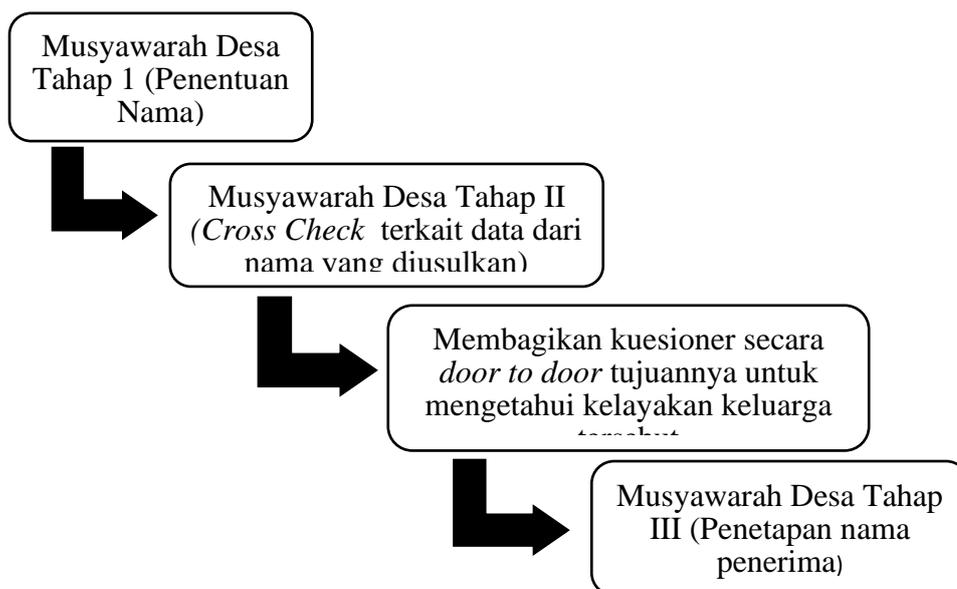
Latar belakang khusus adanya program BLT DD adalah pandemi *covid-19* banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program tersebut bertujuan melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat dari pandemi. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akibat pembatasan kegiatan ekonomi secara makro, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Penerima Bantuan BLT DD di Desa Gading harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak pusat maupun pihak desa gading. Saat ini penerima bantuan langsung tunai dana desa di Gading sejumlah 100 orang, seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa dalam wawancara sebagai berikut: “Jadi sasaran penerima BLT DD di Desa Gading sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang ada yaitu pertama, orang yang belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah pusat seperti PKH, KIS, KKS, dan BLT dengan alasan agar adil dan orang belum menerima bantuan bisa mendapatkan dan sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kedua, lansia yang tidak punya keluarga atau kurang mampu. Ketiga, disabilitas. Keempat, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kelima, orang yang terkena PHK waktu masa pandemi lalu.”

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Setiap program yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, sehingga bisa dikatakan sebagai program yang efektif untuk terus dilanjutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya suatu program dalam organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan sesuai dengan target tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan program tersebut. Penerima Program BLT DD di Desa Gading memiliki pemahaman kurang terhadap bantuan tersebut dikarenakan tidak adanya program sosialisasi yang diberikan oleh pihak desa. Program sosialisasi terkait BLT DD hanya dilakukan satu kali ketika awal pandemi dengan mengundang sebagian dari penerima bantuan saja di Kantor

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kegiatan sosialisasi itu menjelaskan bahwasannya program tersebut merupakan bantuan yang bersifat perbulan untuk masyarakat agar bertahan pada masa pandemi. Hal tersebut menjadi alasan pihak desa untuk tidak melaksanakan program sosialisasi BLT DD secara khusus lagi karena dianggap sudah paham sehingga langsung include dari beberapa tahapan awal.

Alur penetapan penerima bantuan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan Ketua RT/RW, Ketua Dusun dan Perangkat Desa Gading. Musyawarah Desa tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yakni penentuan nama, *cross check*, dan memberikan kuesioner secara *door to door* untuk mengetahui kelayakan calon penerima bantuan. Setelah semua tahapan terlaksana lanjut ke tahapan penetapan nama penerima bantuan.

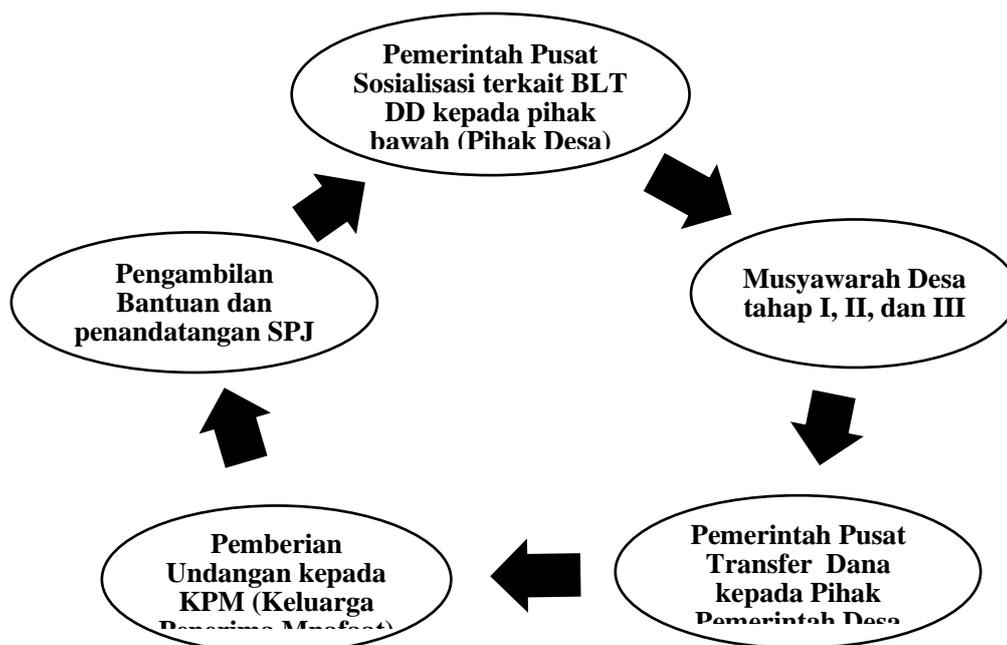


Gambar 4. Alur Penetapan Nama Penerima Bantuan
(Sumber: Peneliti)

Penyaluran BLT DD dilakukan langsung oleh pihak desa dengan cara memberikan undangan ke setiap rumah yang sudah ditetapkan untuk mengambil bantuannya ke desa dan melakukan penandatanganan surat pertanggung jawaban. Dalam proses pengimplementasian BLT DD di gading terdapat pendampingnya yaitu BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Pol Diknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional). Penyaluran BLT DD tidak dilakukan melalui pihak ketiga seperti halnya PKH karena pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan langsung kepada pihak desa, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa melalui wawancara sebagai berikut: “Dalam pengimplementasian BLT DD setiap rumah diberikan undangan untuk datang ke desa dan menandatangani surat perjanjian. Alasan ngambilnya langsung ke Desa tidak menggunakan pihak ketiga karena pemerintah pusat mengirim bantuan langsung ke rekening desa.”

BLT DD disalurkan setiap bulan sekali tergantung pihak pusat mentransfer dana bantuannya telat atau tidak. Jikalau telat biasanya penyaluran bantuan dilakukan dua bulan atau tiga bulan sekali dengan nominal Rp. 600.000/bulan. Seiring berjalannya waktu pandemi mulai hilang akhirnya nominal bantuan turun menjadi Rp.300.000/bulan. Pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran BLT DD adalah seluruh pihak desa baik kades, sekdes, kaur keuangan, pelaksana kegiatan, ketua dusun dan lain-lain. Terkait pemanfaatan BLT DD pihak desa tidak pernah membatasi pihak penerima bantuan, hanya saja ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penerima seperti membeli minuman keras, membayar hutang dan lain-lain. Program BLT DD memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya

masyarakat merasa terbantu khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya seperti membeli beras khususnya bagi masyarakat lansia yang tidak bekerja. Dampak negatifnya terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa sebagai berikut: “Alhamdulillah program BLT DD ini memiliki dampak positif bagi masyarakat yakni paling enggak mereka bisa untuk jaga-jaga membeli beras khususnya orang yang tidak bekerja dan bagi lansia. Oleh karena itu menurut saya program ini sangat bagus untuk dilanjutkan. Sisi lain apabila program ini terus dilanjutkan akan memberikan dampak negatif seperti kecemburuan sosial pada masyarakat dan berakibatkan konflik kecil.



Gambar 5. Alur Implementasi Bantuan
(Sumber:Peneliti)

Penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial dengan menerapkan teori sosiologi modern yakni teori struktural fungsional oleh Talcott Parson. Masyarakat dilihat sebagai sistem dan struktur yang berada didalamnya menjadi satu dan memiliki peran yang sesuai dengan status yang dimilikinya. Fungsi adalah bentuk kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dari sistem (Rocher, 1975:40). Dari pengertian diatas Talcott Parsons percaya bahwa terdapat empat syarat yang harus terpenuhi agar sebuah sistem berjalan dengan lancar yakni AGIL. AGIL merupakan singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), *Latency* (L).

Teori struktural Fungsional dianggap sesuai dalam penelitian ini sebagaimana uraian permasalahan di bawah ini:

1. *Adaptation*

Adaptation merupakan salah satu teori Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa dalam suatu sistem terdapat sebuah lembaga ekonomi yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam sistem tersebut. Pemerintah pusat Menteri Sosial menjadi lembaga yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan melalui Program BLT DD. Program BLT DD disalurkan melalui pemerintah desa dengan harapan agar lebih terstruktur dalam pengimplementasiannya karena dianggap sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.

2. *Goal Attainment*

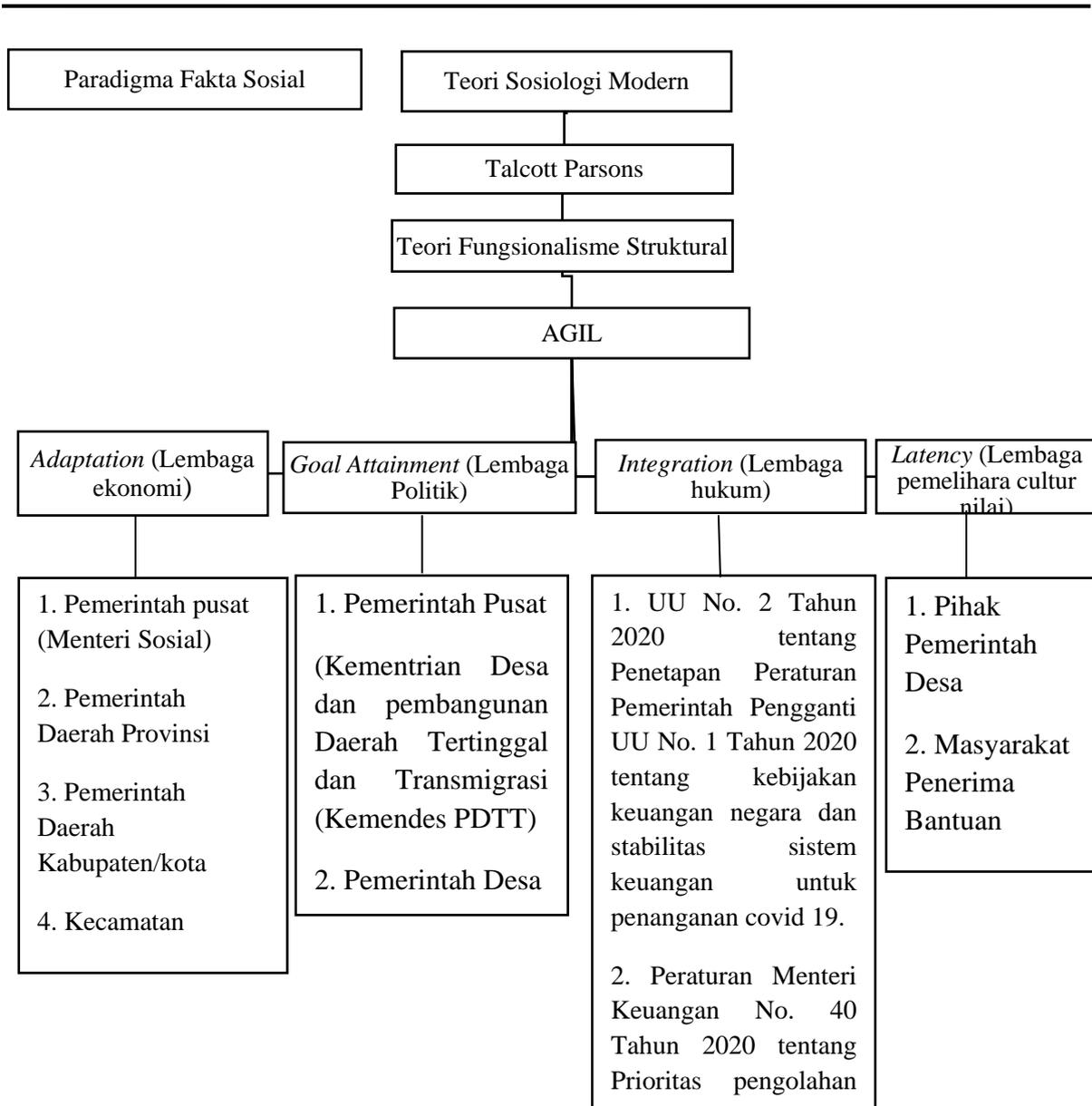
Goal Attainment berhubungan dengan lembaga politik, yang mana dalam sebuah sistem harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utama melalui lembaga tersebut. Pihak desa mempunyai tugas membantu mewujudkan tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutuskan rantai kemiskinan khususnya di Desa Gading. Pihak desa gading berusaha semaksimal mungkin untuk penerima BLT DD tepat sasaran dengan mengikuti beberapa tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Ditinjau dari upaya dalam mencapai tujuan utama program BLT DD semua pemerintah desa gading bekerja sama meningkatkan solidaritas baik kasun, kades, sekdes dan lain-lain.

3. *Integration*

Integration merupakan sebuah konsep bahwa kelembagaan hukum memiliki peranan besar dalam berjalannya sistem-sistem lainnya. Adanya konsep ini bertujuan agar sistem-sistem berjalan sempurna dan terjadinya keteraturan antar sistem sehingga tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional yang mendesak sehingga memerlukan penanganan berbeda dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan RI maka terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya termasuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya program BLT DD diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan *covid 19* pada bagian umum UU yang menyatakan bahwa respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk mengatasi resiko Covid-19 antara lain berupa peningkatan pengeluaran untuk mengurangi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha atau mendukung perekonomian. Selain itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang Prioritas pengelolaan Dana Desa. UU di atas merupakan landasan hukum yang digunakan dalam program BLT DD.

4. *Latency*

Ketika pelaksanaan program BLT DD tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada seperti pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, dan tercapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan program. Maka pemerintah pusat akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan terwujudnya tujuan awal adanya program tersebut dengan peran lembaga pemerintah desa agar prpgram BLT DD dapat dikatakan sebagai program yang efektif. Oleh karena itu, program BLT DD perlu dilanjutkan dan dipertahankan sebagai salah satu program *SDGs (Sustainable Development Goals)* pemerintah dengan bantuan pihak pemerintah desa dan pihak penerima bantuan.



Gambar 6. Kerangka Teori
(Sumber: Peneliti)

Kesimpulan

Berdasarkan realita data di lapangan Program BLT DD dianggap cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan tetapi masyarakat sedikit mengeluhkan terkait keterlambatan bantuan yang dilakukan oleh pihak desa dalam proses penyalurannya dan masyarakat kurang memahami secara penuh atas bantuan yang diberikan tersebut. Namun, penerima program BLT DD selama ini cukup merasakan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan pokok meskipun tidak sampai benar-benar masuk kategori pemutusan rantai kemiskinan secara keseluruhan. Selain itu juga memberikan dampak negatif dalam hubungan sosial yakni kecemburuan sosial. Namun pihak desa tetap berusaha untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut dengan cara melaksanakan beberapa tahapan penetapan penerima bantuan sesuai dengan prosedur dengan transparansi. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa program BLT DD kurang memenuhi kriteria efektif karena beberapa indikator yang kurang dipenuhi di Desa Gading Bululawang Malang yakin terlambatnya penyaluran bantuan,

KPM kurang mengerti terkait program tersebut karena tidak adanya program sosialisasi yang didapatkan dari pihak internal desa.

Referensi

- Anggleni, Andela. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang." *Journal PPS UNISTI* 1, no. 1 (2018): 24–39.
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114-132.
- Dasri Sampulawa 1 Jumiati Tuharea 2 Titus Gaites. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah Di Dusun Lirang Desa Luhu" 1, no. 1 (2022): 87–99.
- Fahmi, Pakri. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Bengkulu Tahun 2011-" 5 (2022).
- Ida, I., & Rijali, S. (2021). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MAHE PASAR KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 4(2), 1670-1682.
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, SA, & Sulastri, S. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Bagikan: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 9 (2), 122-129.
- Mahe, I N, Pasar Village, Haruai District, and Tabalong Regency. "EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MAHE PASAR KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG" 4 (n.d.): 1670–1682.
- Maryam, Siti, and Hestu Rika Cahyani. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022): 50–72.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *Jurnal EL-RIYASAH* 11, no. 1 (2020): 67.
- peraturan pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PP Nomor 15 Tahun 2010)," 2010. <https://www.bphn.go.id/data/documents/10pr015.pdf>.
- Peraturan Pemerintah. "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (PP Nomor 2 Tahun 2020)." 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>.

- Peraturan Pemerintah. "Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 tentang Prioritas pengolahan Dana Desa". 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/40~PMK.07~2020Per.pdf>
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, and M Makmur. "The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community (Study in Mojosari District, Mojokerto Regency)." *Wacana* 16, no. 2 (2013): 79–96. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Depok: Prenada Media Group, 2014.
- Rizaldi, Alvin. "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT," 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yunita, I., & Agustang, A. (2022). Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(2), 181-191.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Witarsa, R., Mufarizuddin, M., & Sularno, S. (2021). PENYULUHAN DAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 410-417.